

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki sumber mata pencaharian atau memiliki penghasilan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Ketentuan tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat (1) yang memberikan pengertian serupa mengenai fakir miskin. Dengan demikian, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik karena tidak memiliki sumber penghasilan maupun karena penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi masalah yang disebabkan oleh kemiskinan salah satunya adalah membuat kebijakan terkait pemberdayaan miskin. Salah satu kebijakannya yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai direncanakan pemerintah sejak 2007. Berdasarkan pada seputusan Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan,

No:31/KEP/MENKOP/KESRA/1X/2007 tentang “Tim Pengadilan Program Keluarga Harapan” yang pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Program Keluarga Harapan (PKH) pertama dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan dikatakan sebagai program unggulan nomor satu dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana skema pemberian bantuan dana PKH akan diberikan selama 1 tahun dalam 4 tahap, yaitu per 3 bulan.

Penerima bantuan PKH Adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan kriteria BPS tetapi tidak semua RTSM bisa menjadi peserta PKH. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil/nifas, memiliki anak balita dan anak sekolah yang menempuh tingkat SD/MI sederajat atau SMP/MTS sederajat, dan SMA/MA sederajat, Kesejahteraan Sosial dan ASPDB (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat). Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga bersangkutan (dapat bibi, nenek, atau kakak perempuan) menjadi penerima bantuan, karena program ini berusaha untuk

membiayai kebutuhan. Akan tetapi penerimaannya mensyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu atau layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita, dan meningkatkan kehadiran sekolah secara rutin/teratur bagi anak-anak KPM yang memiliki usia SD-SMP-SMA.

Berikut adalah skema bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) per tahap penyalurannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia :

Table 1.1
Skema Bantuan PKH

No	Kategori	Indeks/Tahun	Indeks/Per3 Bulan
1.	Ibu Hamil	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
2.	Anak Usia Dini	Rp. 3.000.000	Rp. 750.000
3.	Anak Sekolah SD	Rp. 900.000	Rp. 225.000
4.	Anak Sekolah SMP	Rp. 1.500.000	Rp. 375.000
5.	Anak Sekolah SMA	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
6.	Lanjut Usia 60+	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
7.	Disabilitas Berat	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000

Sumber Data : Pendamping PKH Desa Karau

Bantuan dana PKH yang diberikan mempunyai kategori-kategori tertentu seperti di atas yang dinilai berhak mendapatkannya. Program perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM). Dengan pemberian akses ini, diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan pada asuh belajar anak di rumah, prestasi belajar, kesehatan dan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terbagi dalam tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk komponen pendidikan

dana dipakai untuk membeli perlengkapan seperti seragam, sepatu, tas, dan buku anak sekolah, komponen ini membiayai kebutuhan sekolah anak hingga jenjang SMA. Komponen kesehatan, uang PKH diperuntukkan dapat memenuhi gizi bayi, balita, ibu hamil, membeli perlengkapan dan kebutuhan kesehatan, transportasi untuk mengakses fasilitas kesehatan. Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas berat diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, akses pelayanan sosial seperti fasilitas kesehatan, perawatan, dan pendampingan yang dibutuhkan, serta untuk meringankan beban ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 tercatat sekitar 11,62 ribu jiwa dengan persentase sebesar 4,53%. Selanjutnya, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan menjadi sekitar 10,98 ribu jiwa dengan persentase sebesar 4,21%. Dibandingkan dengan tahun 2024, tingkat kemiskinan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,32%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tergolong lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga upaya

penanggulangan kemiskinan masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program pemerintah, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun, dalam pelaksanaan PKH di Desa Karau masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa di antaranya adalah Kurangnya ketertiban administrasi dimana proses perbaruan data dan verifikasi data penerima masih belum optimal, seperti keterlambatan dalam proses validasi dan perbaruan data sehingga menyebabkan terlambatnya penyaluran dana bantuan kepada masyarakat, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, seperti ada beberapa penerima yang tidak sesuai kriteria yang saat ini memiliki kondisi ekonomi lebih baik, mempunyai aset yang memadai, sementara sebagian masih banyak masyarakat miskin yang terabaikan dan protes tentang mereka yang tidak masuk dalam keluarga penerima manfaat dalam program tersebut, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana PKH sehingga hal tersebut membuat pemahaman masyarakat kurang terhadap aturan dan tujuan program serta tidak sesuai pemanfaatan dana PKH, yang seharusnya diarahkan untuk mendukung akses pendidikan anak sekolah, layanan kesehatan ibu hamil, balita serta peningkatan kesejahteraan sosial, justru digunakan untuk kebutuhan diluar ketentuan program. Di Desa Karau juga ditemukan penerima yang mengalokasikan dana PKH untuk membayar hutang, membeli pakaian dan keperluan lain yang tidak termasuk dalam tujuan utama program. Kondisi ini mengakibatkan penyaluran dana PKH menjadi kurang optimal.

Berdasarkan observasi awal peneliti lakukan di Desa Karau, Desa, maka di dapat permasalahan sebagai berikut :

1. Kurang tepatnya sasaran yang menerima bantuan PKH ini, seperti ada beberapa penerima yang tidak sesuai kriteria yang saat ini memiliki kondisi ekonomi lebih baik, mempunyai aset yang memadai, sementara sebagian masih banyak masyarakat yang kurang mampu tapi tidak mendapatkan bantuan (*Sumber : Hasil Observasi Peneliti Dari Aparat Desa Karau dan Masyarakat*)
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana PKH sehingga hal tersebut membuat pemahaman Masyarakat kurang terhadap tujuan program serta terjadi ketidak sesuaian penggunaan dana program, dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat justru digunakan untuk membayar hutang dan membeli pakaian (*Sumber : Hasil Observasi Peneliti dari Masyarakat Desa Karau*)
3. Kurangnya ketertiban administrasi Dimana proses perbaruan data dan verifikasi data penerima masih belum optimal, seperti keterlambatan dalam proses validasi dan perbaruan data sehingga menyebabkan terlambatnya penyaluran dana bantuan kepada Masyarakat. (*Sumber : Hasil Observasi Peneliti Kepada Aparat Desa Karau*)

Berdasarkan fenomena masalah tersebut peneliti tertarik meneliti terkait “ **EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DIDESA KARAU KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH** “

B. Fokus Penelitian

Permasalahan dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten

Hulu Sungai Tengah ”. Maka untuk mengukur Efektivitas program tersebut difokuskan kepada beberapa aspek permasalahan menurut Budiani dalam (Erika Dwi Nanda 2024) sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam peneitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pelayanan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), dalam upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaksana Program (Pendamping PKH)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pendamping PKH dalam meningkatkan kualitas pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat PKH, mengenai pentingnya pemanfaatan bantuan secara tepat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman peneliti dalam menganalisis efektivitas suatu program pemerintah, serta sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.